

PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENCEGAH UPAYA PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRAK

Penggunaan senjata nuklir telah merubah pandangan dunia akan perkembangan pesat dunia persenjataan. Tragedi bom nuklir Hiroshima-Nagasaki telah menghasilkan jumlah korban yang sangat banyak, sehingga muncul kesadaran dari komunitas internasional untuk meregulasi penggunaan senjata nuklir. Namun dalam pelaksanaannya, regulasi ini belum secara efektif berlaku bagi semua pemegang senjata nuklir. Penelitian ini dibuat dengan memfokuskan pembahasan untuk mengkaji pengaturan penggunaan senjata nuklir yang terkandung dalam Perjanjian Internasional serta upaya-upaya yang dapat dilakukan Dewan Keamanan agar Resolusi yang dikeluarkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan melakukan pendekatan akan kasus Korea Utara. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder, dan melakukan pendekatan terhadap kasus Korea Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Internasional sendiri telah mengakui prinsip non-proliferasi senjata nuklir dan mengkomodirnya ke dalam berbagai Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional yang telah ada juga mengkomodir norma *jus cogens* untuk memperkuat kepastian hukum dalam menahan penggunaan senjata nuklir. Untuk memastikan pematuhan resolusi yang lebih efektif, harus ada langkah nyata dalam pemberian sanksi bagi negara-negara yang terikat oleh resolusi tersebut, namun menolak untuk mematuhi aturan yang terkandung. Sanksi ini dapat berupa embargo ekonomi, penangguhan hak atau dikeluarkan dari keanggotaan PBB, atau sanksi militer. Maka dari itu, hukum internasional memainkan peran penting dalam membatasi penggunaan senjata nuklir melalui perjanjian internasional dan norma *jus cogens*, sementara Dewan Keamanan dapat menerapkan sanksi dan upaya perundingan untuk memastikan kepatuhan negara seperti Korea Utara terhadap Resolusi terkait non-proliferasi nuklir.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Dewan Keamanan PBB, Senjata Nuklir

THE UN SECURITY COUNCIL'S ROLE IN PREVENTING NUCLEAR WEAPONS USE UNDER INTERNATIONAL LAW

ABSTRACT

The use of nuclear weapons has changed the world's view of the rapid development of weaponry. The Hiroshima-Nagasaki nuclear bomb tragedy resulted in a very large number of victims, so there is awareness from the international community to regulate the use of nuclear weapons. However, in its implementation, this regulation has not effectively applied to all holders of nuclear weapons. This research is made by focusing on the discussion to examine the regulation of the use of nuclear weapons contained in International Treaties and the efforts that can be made by the Security Council so that the Resolutions issued can be implemented properly by approaching the North Korean case. This research uses the Normative Juridical method using secondary data and approaches the case of North Korea. The results of this study indicate that International Law itself has recognized the principle of non-proliferation of nuclear weapons and accommodated it into various International Treaties. The existing International Treaties also accommodate jus cogens norms to strengthen legal certainty in restraining the use of nuclear weapons. To ensure more effective compliance with the resolution, there must be concrete steps in sanctioning countries that are bound by the resolution but refuse to comply with the rules contained. These sanctions can be in the form of economic embargoes, suspension of rights or expulsion as a UN member, or military sanctions. Therefore, international law plays a significant role in limiting the use of nuclear weapons through international treaty and the norm of jus cogens, while the Security Council can impose sanctions and engage in diplomatic negotiations to ensure compliance by countries like North Korea with nuclear non-proliferation resolutions.

Keyword: International Law, UN Security Council, Nuclear Weapons